



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : DEWAN KETAHANAN NASIONAL (WANTANAS)  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : T.S.N.B. HUTABARAT
2. Jabatan : SEKRETARIS JENDERAL
3. NHK : 260025

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 12.682.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/185 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , WARISAN Rp. 2.500.000.000
2. Bangunan Seluas 33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
3. Bangunan Seluas 320 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
5. Tanah Seluas 3242 m2 di KAB / KOTA TANJUNG PANDAN, HASIL SENDIRI Rp. 324.200.000
6. Tanah Seluas 3000 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 225.000.000
7. Tanah Seluas 15020 m2 di KAB / KOTA TANJUNG PANDAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.502.000.000
8. Tanah Seluas 1987 m2 di KAB / KOTA TANJUNG PANDAN, HASIL SENDIRI Rp. 198.700.000
9. Tanah Seluas 3326 m2 di KAB / KOTA TANJUNG PANDAN, HASIL SENDIRI Rp. 332.600.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 750.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI MITSUBISHI XPANDER SL SPO-L 4X2A Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000



2. MOBIL, TOYOTA TOYOTA FORTUNER Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	633.940.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	1.922.170.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.422.982.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	18.411.592.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	18.411.592.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.